

# **PEMISAHAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DENGAN ORGANISASI SAYAP POLITIK: SEBUAH KENISCAYAAN**

Oleh: Puguh Windrawan  
(Pengajar Fakultas Hukum Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta/ Kepala  
Departemen Politik HICON Law & Policy Strategic

## ***abstrak***

*Beberapa Organisasi kemasyarakatan (Ormas) di Indonesia disinyalir memiliki kedekatan dengan partai politik. Kedekatan itu tercermin dalam perilaku ormas yang mendukung, baik secara politik maupun mobilisasi massa kepada partai politik tertentu. Hal ini tentu saja merugikan ormas yang tidak mempunyai afiliasi kepada partai politik. Untuk itu, diperlukan aturan yang tegas untuk membatasi perilaku ormas dan organisasi sayap politik. Dalam desain ini, organisasi sayap politik mesti bersikap fair dengan menyatakan afiliasinya kepada partai politik. Dengan demikian, partai politik bisa memandang organisasi sayap politik sebagai kader dan bagian tak terpisahkan dari organisasinya. Di samping itu, pemisahan yang tegas antara Ormas dan organisasi sayap politik akan memunculkan transparansi bagi konstituen dan masyarakat pada umumnya. Situasi ini sekaligus bisa menjadi penanda bagi perkembangan partai politik untuk berperilaku lebih baik.*

**Kata Kunci: Ormas, partai politik, organisasi sayap politik**

## ***abstract***

*In Indonesia, many community organizations (Cos) have a close relation to political parties. This relationship is reflected in the behavior of the organization that supports, either politically or mass mobilization to certain political party's interest. This is, obviously, detrimental to mass organizations that have no affiliation to political parties. For this reason, strict rules are needed to limit the behavior of community organizations and political wing organization. In this research design, political wing organizations must be fair by declaring affiliates to a certain political party. Thus, political parties can view the organization of the political wing as a cadre and an inseparable part of their organization. Besides that, a strict separation between CSOs and political wing organizations will create transparency for constituents and society in general. This circumstance can also be a significant improvement for reshaping political parties to conduct in ethically right.*

**Keywords: community organization, political party, political wing organization**

## **A. PENDAHULUAN**

Dalam negara yang menganut sistem demokrasi, maka pelibatan partai politik dalam ranah Pemilihan Umum (pemilu), merupakan alat legitimasi yang sah. Keterlibatan partai politik, seberapa banyak dan dengan berbagai keberagaman ideologinya, menunjukkan kedewasaan sebuah negara. Banyak tidaknya partai politik yang terlibat dalam pemilu, juga sangat bergantung pada bagaimana sebuah negara memberikan tafsiran terhadap demokrasi itu

sendiri. Penafsiran itu lantas tertuang dalam aturan-aturan hukum, sesuai dengan kondisi sosiologis sebuah negara.

Dengan kata lain, penafsiran ini yang membuat pemilu di negara satu dengan negara lain berbeda. Terutama soal berapa banyaknya partai politik yang diperkenankan untuk turut serta. Setiap negara mempunyai perbedaan dalam memandang berapa jumlah partai politik yang mesti ada dalam setiap pemilu. Hal ini akan sangat bergantung pada kondisi sosiologis sebuah negara. Ada yang jumlahnya tetap, seperti yang terjadi di Amerika Serikat. Ada pula yang selalu berubah sesuai dengan peraturan, dinamika politik dan klasifikasi tertentu, seperti yang terjadi di Indonesia.<sup>1</sup>Toh, banyak sedikitnya partai politik tak lantas membuat sebuah negara terdegradasi dalam konteks negara yang demokratis.

Partai politik inilah yang kemudian dalam bahasan Hans Kelsen disebut sebagai "Fiksi Perwakilan".<sup>2</sup> Bagaimanapun juga, partai politik merupakan jelmaan dari otoritas pemilih di bilik suara. Masyarakat akan memilih partai tertentu, dan dengan pemilihan tersebut, maka masyarakat akan menaruh harapan perihal kondisi bangsa dan negara selama kurun waktu yang tertentu pula. Dengan memandang situasi yang tampak sederhana ini, maka partai politik memiliki sebenarnya memiliki peranan yang penting. Ia tidak saja menjadi medium demokrasi, tetapi juga menjadi ujung tombak bagaimana demokrasi berlangsung dalam sebuah negara.

Untuk itu, diperlukan aturan dan langkah yang strategis, agar partai politik mampu menjadi alat demokrasi yang positif. Upaya-upaya ini tentu saja bisa dimulai dari area yang bersifat teknis. Dalam konteks Indonesia, partai politik tidak berdiri sendiri. Ia ada dan selalu berkesinambungan dengan dukungan massa. Salah satu kemunculan partai politik di Indonesia, biasanya terlebih dahulu terbentuk melalui organisasi kemasyarakatan (ormas). Hal ini kental terasa setelah reformasi berjalan dan didukung oleh banyak munculnya partai politik baru. Bahkan untuk partai politik

---

<sup>1</sup> Ragam kebudayaan bisa menjadi salah satu sebab, mengapa sebuah negara memiliki ideologi partai yang berbeda. Indonesia merupakan kawasan yang memiliki bermacam suku, entitas dan kemajemukan adat. Jika kita meninjau melalui unsur budaya masyarakat untuk melihat karakteristik bagaimana partai politik berkembang, maka akan ditemui kenyataan yang tidak tunggal. Selain mobilisasi yang kental, ragam budaya layak untuk diuji sebagai salah satu faktor berkembangnya banyak partai di Indonesia. Perilaku ragam budaya di Indonesia, salah satunya bisa dicermati dalam Thomas Stamford Raffles, *The History of Jawa*, Cetakan pertama, Narasi, Yogyakarta, 2008.

<sup>2</sup> Hans Kelsen, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, cetakan I, Penerbit Nuansa dan Nusamedia, Bandung, 2006, hlm. 409.

setua Golongan Karya (Golkar) yang notabene mengikuti pemilu semenjak tahun 1971, juga berasal dari berbagai kumpulan berbagai ormas.<sup>3</sup>

Dalam area normatif hukum ketatanegaraan misalnya, keberadaan ormas ini termaktub dalam UU No. 17 Tahun 2013 sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2017. Disandingkan dengan kondisi sosiologis, ternyata ormas banyak yang kemudian menginduk dalam partai politik. Ia menjadi sayap partai politik. Padahal, ada beberapa aturan yang jika dikaji secara mendalam, saling bertabrakan antara UU Ormas dengan UU No. 2 Tahun 2008 sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.

Jika merunut pada kondisi tersebut, maka makalah ini sebenarnya mempunyai tujuan tegas. Makalah ini hendak mengusulkan pemisahan tegas antara UU Ormas dengan keberadaan organisasi sayap politik. Pemisahan yang akan disertai dengan hal-hal apa saja yang mesti diperhatikan dalam membenahan organisasi sayap partai tersebut. Pemisahan ini sekaligus bisa menjadi area yang menantang bagi partai politik untuk melakukan membenahan internalnya partainya, sekaligus memilah proses kaderisasinya. Bagaimanapun juga, partai politik yang baik dan berwibawa akan selalu memperhatikan proses kaderisasi.

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Tipikal Partai Politik di Indonesia**

Dengan meminjam istilah yang diperkenalkan Max Weber, organisasi terstruktur bisa dicermati dalam tipikal yang (a) tradisional; (b) karismatik, dan (c) rasional.<sup>4</sup> Meskipun Weber dianggap salah satu penggagas munculnya kapitalisme di Eropa, tetap pemilahan istilah tersebut bisa membantu kita untuk mengamati pola yang terjadi dalam partai politik di Indonesia. Dua tipikal awal, tradisional dan

---

<sup>3</sup> Dalam laman resmi partai tersebut (<http://www.golkar.or.id/sejarah-partai-golkar>) yang diakses pada 15 April 2019, terdapat indikasi bahwa Golkar awalnya memang kumpulan dari berbagai Ormas yang kemudian berfusi menjadi Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar). Diantara Ormas tersebut adalah Koperasi Serba Guna (Kosgoro), Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (Soksi), Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR), Organisasi Profesi, Ormas Pertahanan Keamanan (Hankam), Gerakan Karya Rakyat Mandiri (Gakari), dan Gerakan Pembangunan. Bandingkan data ini dengan liputan jurnalistik yang apik oleh awak Tirto pada laman <https://tirto.id/golkar-digagas-sukarno-lalu-meninggalkannya-cs1d>, yang diakses pada tanggal yang sama.

<sup>4</sup> Ronald H. Chilcote, *Teori Perbandingan Politik: Penelusuran Paradigma*, cetakan pertama, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 144.

karismatik, masih menonjol dalam pengelolaan sebagian besar partai politik di Indonesia. Dua tipikal tersebut mengandalkan garis kepemimpinan tokoh yang berkesinambungan satu sama lain. Hal ini menyulitkan mereka yang ada di luar garis kepemimpinan untuk memimpin organisasi.

Jika pun berusaha untuk menjadi organisasi yang rasional, partai politik di Indonesia mengalami stagnasi. Minimal mereka yang mengalami kebuntuan akan mendirikan partai politik baru. Partai Golkar adalah contoh nyata dalam konteks ini. Banyak kadernya yang kemudian mendirikan partai baru, yang secara otomatis juga didukung oleh ormas yang baru. Dengan kata lain, kemunculan partai baru ternyata juga sejalan dengan kemunculan ormas yang baru.<sup>5</sup>

Selain tipikal struktur organisasi seperti yang ditawarkan Weber, partai politik di Indonesia juga mengandalkan konsentrasi massa. Hal ini bisa terlihat dalam kampanye-kampanye yang dilakukan partai politik. Mobilisasi massa yang berlebihan ini rentan dengan konflik. Terlebih lagi, jika melibatkan massa dengan jumlah yang relatif besar. Jika merujuk kepada tahapan pemilu misalnya, akan ditemui lima tahapan yang paling menarik. Kelimanya masing-masing adalah pendaftaran pemilih, pencalonan, kampanye, penyerahan suara dan perhitungan suara. Merujuk pada tahapan tersebut, ternyata fase kampanye merupakan ajang terbuka yang rentan menyedot perhatian dan konflik. Hal yang akan berujung pada kekerasan fisik. Sebabnya jelas, menurut Arbi Sanit, hal itu disebabkan adanya keterlibatan masyarakat luas secara fisik.<sup>6</sup>

Selain itu, dukungan mobilisasi massa juga melibatkan ormas-ormas sebagai pendukung partai politik. Ormas-ormas yang mendukung partai politik bahkan bisa berubah-ubah setiap waktu, sesuai dengan kepentingan partai dan Ormas tersebut. Tidak ada garis pemisah yang tegas antara Ormas dan partai politik. Sebagai contoh, ada beberapa Ormas di Yogyakarta yang sepenuhnya mempunyai afiliasi

---

<sup>5</sup> Beberapa mantan petinggi Partai Golkar kemudian mendirikan partai baru selepas tidak bisa menjadi elite yang menguasai partai. Di antaranya ada di Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Berkarya, Gerindra, dan Hanura. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang dianggap partai yang mengutamakan kaderisasi juga diambang perpecahan dengan kemunculan Garbi sebagai ormas. Petinggi Garbi adalah dua mantan elite PKS.

<sup>6</sup> Meskipun Arbi Sanit menuliskannya untuk merefleksikan pandangannya atas pemilu yang dilakukan Orde Baru, namun situasinya masih relevan untuk saat ini. Pandangan ini bisa diketemukan dalam Arbi Sanit, *Partai, Pemilu, dan Demokrasi*, cetakan I, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1997, hlm. 87.

dengan partai politik. Di bawah Partai Persatuan Pembangunan (PPP), ada beberapa Ormas. Di antaranya adalah Gerakan Pemuda Ka'bah (GPK), Hamka Darwis, Laskar Hizbullah, Barisan Muda Ka'bah (BMK), Angkatan Muda Ka'bah (AMK), Himpunan Muda Ka'bah (HMK). Sementara yang berafiliasi dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), sebutlah Ormas bernama Tentara Langit.

Mereka yang nama organisasinya disebutkan itu, acapkali juga melakukan kegiatan sosial dan berbagai bentuk kegiatan kerelawanan lainnya. Bentuk-bentuk partisipasi seperti ini tidak berbeda dengan Ormas yang tidak terhubung dengan partai politik tertentu. Hal yang tentu saja bisa jadi membingungkan masyarakat banyak. Contoh itu hanya sekedar menyebut Ormas yang ada di satu daerah: Yogyakarta. Jumlahnya tentu akan sangat banyak jika kita akan mengkaji jumlahnya secara detail, terutama di seluruh Indonesia.

Selain masalah-masalah di atas, hal yang kerap mengemuka adalah adalah pemberian keuntungan materiil (politik uang) dalam level mikro. Hal yang menyalahi etika, bahkan hukum, tetapi dianggap biasa oleh para pelaku politik itu sendiri. Jika ini yang terjadi, maka kemenangan lewat pemilu bisa didapatkan tanpa peduli dengan kebijakan umum dari politisi yang bersangkutan. Bahkan, reputasi politisi menjadi halkesekian untuk ditelisik. Kenyataan ini menjadikan kemenangan pemilu akan sepenuhnya ditentukan oleh seberapa banyak sumber daya yang bisa dikumpulkan oleh politisi dan partai tertentu.<sup>7</sup> Pemilu yang seperti ini tentu saja memerlukan biaya yang tinggi, selain legitimasi kualitas kepemimpinannya juga diragukan. Jika partai politik dan politisi melakukan hal ini dalam pemilu, Scott menyatakan sebuah hal. Ada indikasi bahwa masyarakat yang menerima hal ini adalah mereka yang pengorganisasiannya lemah. Sasarannya terutama mereka yang berada dalam rentang ekonomi kelas bawah.<sup>8</sup>

## **2. Pemisahan Organisasi Masyarakat dengan Organisasi Sayap Politik**

Ada dua alasan, mengapa Ormas dan organisasi sayap politik mesti dipisahkan dalam dua aturan yang berbeda. Dua alasan tersebut meliputi alasan normatif dan alasan sosiologis. Kedua alasan tersebut sebagai juga bertindak sebagai basis

---

<sup>7</sup> Eva Etzioni-Halevy, *Demokrasi dan Birokrasi: Sebuah Dilema Politik*, cetakan I, Total Media dan Matapena Institute, 2011, hlm. 272.

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 273.

pemikiran mengapa keduanya harus dipisahkan dalam hierarkis peraturan yang sama: undang-undang. Jika Ormas diatur dalam level undang-undang, maka setidaknya organisasi sayap politik juga berada di level tersebut. Kekuatannya menjadi lebih mengikat dan akan memiliki sanksi yang tegas, berupa sanksi pidana bagi yang melanggarnya.<sup>9</sup>

Secara normatif, memang UU Ormas dan UU Partai Politik banyak dan kerap bersinggungan. Beberapa hal yang saling bertolak belakang diantaranya adalah tentang boleh tidaknya menjadi organisasi yang *profit oriented*. Ormas diperbolehkan melakukan usaha untuk kepentingan bersama. Hal yang sama sekali tidak diperbolehkan oleh partai politik. Padahal, kondisi sosiologisnya adalah Ormas acapkali melakukan dukungan kepada partai politik, baik berupa dukungan kepentingan politik atau mobilisasi massa. Ini adalah hal krusial yang mesti menjadi bahan perhatian secara saksama. Hal yang sama juga ditinjau dari sisi keanggotaannya serta bagaimana dua organisasi itu merekrut anggotanya.

Ketika Ormas dan partai politik bersinggungan dan saling mendukung satu sama lain, ada potensi pelanggaran yang terjadi. Masyarakat akan kesulitan membedakan, mana Ormas yang mendukung kegiatan partai politik, dan mana Ormas yang memang didirikan sesuai dengan UU Ormas. Situasi tersebut menjadi salah satu indikasi mengapa harus ada pemisahan yang tegas antara UU Ormas dengan organisasi sayap partai politik. Di lain sisi, masyarakat memerlukan transparansi informasi yang memadai untuk bisa menentukan sikap terhadap organisasi sayap partai politik. Sikap yang kemudian bisa terwujud dalam bentuk dukungan atau sebaliknya, tidak mendukung sama sekali.

Pemisahan yang tegas, mutlak diperlukan. Dewasa ini, seperti yang tercantum dalam UU Ormas, ada kecenderungan untuk menyamaratakan keberadaan Ormas pendukung partai politik dengan Ormas pada umumnya. Ormas yang mempunyai kecenderungan pada profesi, hobi, minat dan bakat, bahkan suporter sepakbola, ternyata diperlakukan sama dengan Ormas yang terafiliasi dengan partai politik. Sebuah hal yang mestinya dibedakan, mengingat fungsi dan kecenderungan tujuan kegiatannya sama sekali berbeda.

---

<sup>9</sup> Lihat Pasal 15 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

### **3. Hal-hal yang Perlu Dicermati dalam Pembentukan Peraturan tentang Organisasi Sayap Politik**

Dalam proses pembenahan sistem politik, organisasi sayap politik memerlukan aturan yang memadai. Mereka mesti diperlakukan setara dengan partai politik. Ini lantaran organisasi sayap politik hendak memberikan dukungan yang memadai kepada partai politik. Ada beberapa hal pokok yang mesti diperhatikan, tatkala ingin merumuskan aturan tentang organisasi sayap politik.

#### **a. Landasan Bagi Partai Politik untuk Melakukan Kaderisasi**

Hal ini menjadi tujuan utama bagi pembentukan organisasi sayap politik. Sudah menjadi rahasia umum, bahwa proses kaderisasi di partai politik bermasalah. Jika proses kaderisasi tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya, maka partai politik akan kehilangan figur-figur yang berkualitas. Dalam menyikapi situasi ini, salah satu jalan yang bisa ditempuh adalah menyiapkan kader sedini mungkin. Hal ini bisa dilakukan di organisasi sayap partai politik. Jenjang karier dalam partai politik bisa direkam sebelumnya melalui organisasi sayap politik.

Hal ini juga dilakukan sebagai salah satu bentuk transparansi partai politik kepada konstituennya. Rekam jejak politisi menjadi lebih akurat dan mudah dilihat oleh masyarakat banyak. Jika hal ini berjalan lancar, ada kemungkinan masyarakat akan dipermudah dalam melakukan seleksi terhadap wakil rakyat maupun pemimpinnya. Dalam hal ini, kembali lagi bahwa transparansi menjadi kata utama dalam hubungan antara partai politik dengan konstituen atau masyarakat. Kedewasaan dalam berpolitik juga akan semakin bertambah tatkala masyarakat lebih mudah melihat rekam jejak si politisi. Dengan berbekal keyakinan akan sosoknya, kemungkinan besar masalah politik uang akan terhindarkan dengan sendirinya.

Anggota organisasi sayap partai politik bisa dimulai dari dini. Bisa dimulai sesuai dengan syarat administratif kependudukan. Misalnya, minimal berusia 17 tahun. Dengan acuan tersebut, maka organisasi sayap politik ini bisa lebih berkembang dan menyasar kepada kalangan muda usia. Hanya saja, mesti ada pembatasan juga dalam soal sasaran keanggotaan. Organisasi sayap politik tidak

boleh didirikan bersamaan dengan kedudukan lembaga pendidikan atau lembaga akademik. Sehingga dalam hal ini, tidak boleh organisasi sayap politik tumbuh di lingkungan kampus. Ini dilakukan untuk menjaga marwah akademik di lingkungan pendidikan. Politik praktis memang mesti dibatasi di lingkungan yang menjunjung tinggi proses akademik.

#### **b. Penuangan Afiliasi yang Jelas Kepada Partai Politik**

Setelah tujuan didirikannya organisasi sayap politik tercapai, yaitu sebagai proses kaderisasi partai politik, mereka mesti menuangkannya secara normatif. Dalam AD/ART sebagai salah satu syarat pendirian organisasi, harus dituangkan secara jelas dan detail, kepada partai politik mana organisasi sayap politik ini berpihak. Dengan demikian nasib dan kualitas organisasi sayap politik akan segaris dengan partai politik yang bersangkutan. Jika konstituen dan masyarakat percaya kepada program-program yang dicanangkan oleh partai politik, secara otomatis, organisasi sayap politik juga turut terjaga keberlanjutannya.

Lagi-lagi, yang menjadi kata kunci disini adalah proses transparansi. Ketika organisasi sayap politik itu secara jelas menuangkan keberpihakannya kepada partai tertentu, maka masyarakat akan menilainya. Masyarakat juga punya informasi yang cukup, apakah akan bergabung atau tidak dengan organisasi tersebut. Hal yang kemungkinan akan sama dengan persepsi mereka soal partai politik yang didukungnya.

#### **c. Tidak Bisa Melakukan Kerja-Kerja yang Bersifat Profit Oriented**

Klausul ini juga diperlukan untuk mempertegas pemilahan antara Ormas dengan organisasi sayap politik. Klausul dalam UU Partai politik yang tidak memperbolehkan bersikap *profit oriented*. Dengan desain yang sama, organisasi sayap politik juga demikian. Diharapkan organisasi sayap politik bersikap dan bersifat mandiri yang berarti ini sejalan dengan kontur partai politik yang bersangkutan. Mereka yang akan mendirikan organisasi sayap politik diharapkan mempunyai kecenderungan untuk menjadikan klausul ini sebagai landasan dasar.

#### **d. Jumlah Keterwakilan Perempuan dan Penyandang Disabilitas**

Lantaran diperlakukan nyaris sama dengan partai politik, maka organisasi sayap politik juga tunduk pada klausul yang sama. Misalnya tentang berapa jumlah keterwakilan perempuan dalam organisasi sayap politik tersebut. Hal ini dilakukan untuk menyamakan persepsi antara partai politik dengan organisasi sayap politik. Begitu juga mesti ada klausul tentang penerimaan anggota khusus penyandang disabilitas. Persoalan berapa jumlah anggota untuk organisasi sayap politik, bisa didiskusikan lebih lanjut. Namun, tujuan terpenting dari klausul tersebut adalah menyadarkan peran penting perempuan. Selain itu, juga terdapat peran penting penyandang disabilitas untuk mengakomodasi pemenuhan hak-haknya, sesuai dengan wacana hak asasi manusia yang selama ini berkembang.

#### **e. Anggota Organisasi Sayap Politik Tidak Boleh Mencalonkan Diri Menjadi Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD)**

Hal ini sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap permohonan uji materi Pasal 182 huruf I UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. MK melarang pengurus partai politik untuk menjadi anggota DPD. Hal yang sama juga berlaku bagi anggota organisasi sayap politik yang didesain untuk menjadi anggota partai politik. Rumusan ini menjadi penting untuk dikedepankan, sekaligus menjadi marwah DPD agar terhindar dari anasir partai politik. Dikotomi tegas antara DPD dan partai politik tetap diperlukan dalam kaitannya dengan keberlangsungan struktur ketatanegaraan di Indonesia.

### **C. PENUTUP**

Dengan menyimak beberapa realitas normatif dan sosiologis di atas, seyogyanya ada pemisahan tegas antara Ormas dengan organisasi sayap politik. Konstruksi berpikir ini tentu saja membutuhkan kemauan dan kemampuan politik pemerintah dan lembaga legislatif. Tentu saja, lantaran hanya kedua lembaga negara tersebut yang mempunyai kewenangan untuk merumuskan dan menentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Setidaknya pemikiran ini harus dimulai dari sekarang untuk kemudian dituntaskan dan diterapkan pada tahapan pemilu mendatang.

Keuntungannya akan lebih terasa bagi masyarakat banyak, apabila hal ini dilakukan. Dengan tidak jelasnya pembagian tujuan dan perilaku organisasi antara Ormas dan organisasi sayap politik, menyebabkan Ormas mendapatkan predikat buruk. Ia bisa jadi "berwajah ganda". Di satu sisi dianggap sebagai organisasi dengan struktur kerelawanan yang kuat, tetapi di sisi lain justru dianggap sebagai alat politik praktis. Situasi yang sebenarnya tidak terlalu menguntungkan. Ormas dengan determinasi tinggi ditambah dengan massa yang banyak, menjadi Ormas yang potensial untuk didekati oleh partai politik. Ini akan selalu terjadi apabila tidak ada pemisahan yang tegas diantara keduanya. Jika situasinya begini, Ormas akan selalu dikelilingi oleh partisan-partisan politik dan akan keluar jalur dari tujuannya semula.

Dengan mengatur organisasi sayap politik dalam bagian tersendiri, situasi ini bisa dihindari. Masyarakat juga akan lebih mudah menafsirkan, mana Ormas dan mana organisasi sayap politik. Untuk bergabung dan memilih di antara keduanya, juga bukan hal yang sulit untuk dilakukan. Selain itu, kedewasaan partai politik juga akan tercermin dengan keberadaan sayap organisasi politik. Memilih proses kaderisasi secara berjenjang lewat organisasi sayap politik adalah keniscayaan. Ini harus dilakukan apabila partai politik berkeinginan untuk mengikis budaya patron-klien yang berkembang selama ini.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Arbi Sanit, *Partai, Pemilu, dan Demokrasi*, cetakan I, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1997.

Eva Etzioni-Halevy, *Demokrasi dan Birokrasi: Sebuah Dilema Politik*, cetakan I, Total Media dan Matapena Institute, 2011.

Hans Kelsen, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, cetakan I, Penerbit Nuansa dan Nusamedia, Bandung, 2006.

Ronald H. Chilcote, *Teori Perbandingan Politik: Penelusuran Paradigma*, cetakan pertama, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

Thomas Stamford Raffles, *The History of Jawa*, Cetakan pertama, Narasi, Yogyakarta, 2008.

### Laman Internet

"Sejarah Partai Golkar", dalam <http://www.golkar.or.id/sejarah-partai-golkar>, diakses pada 15 April 2019.

"Golkar: Digagas Sukarno, Lalu meninggalkannya", dalam <https://tirto.id/golkar-digagas-sukarno-lalu-meninggalkannya-cs1d>, diakses pada 15 April 2019.

### **BIOGRAFI SINGKAT PENULIS**

Puguh Windrawan, lahir di Wonosobo pada 9 Desember 1978. Menyelesaikan studi S1 dan S2-nya di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta. Saat ini mengajar di Fakultas Hukum Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta. Selain mengajar, juga bergabung di sebuah konsultan hukum, politik dan kajian strategis (Kepala Departemen Politik HICON Law & Policy Strategic). Karya ilmiah dan artikel ilmiah populer banyak dikaji dan ditulisnya. Beberapa kajian dan tulisannya juga sudah bisa diketemukan di laman internet.